

## ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Charoline Cheisviyanny<sup>a</sup>, Herlina Helmy<sup>b</sup>, Sany Dwita<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Email: [charoline.cheisviyanny@gmail.com](mailto:charoline.cheisviyanny@gmail.com)

<sup>b</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Email: [lynn.herlin@gmail.com](mailto:lynn.herlin@gmail.com)

<sup>c</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Email: [sanydwita@gmail.com](mailto:sanydwita@gmail.com)

---

### Abstract

*This research aims to find out how the quality of the Local Government website in applying the principles of good governance (transparency, accountability, effectiveness, and efficiency) as well as an assessment of the features contained in the website. The research approach used is interpretive-descriptive. The research object is 16 cities in Sumatera Barat. Data is analyzed by using scoring analysis techniques. The results showed: (1) the quality of the website in accordance with the principles of good governance in cities in West Sumatra is still low in West Sumatra and (2) The low quality of the website causes the inability of users (government, companies, investors and the public) in utilizing the Local Government website in West Sumatra. It suggests: (1) to conduct periodic evaluations in developing websites from the central government, (2) to assign special staffs with an educational background in information technology to maximize the function of the website, (3) to socialize the use of local government websites to the public, and (4) for further researches, to conduct a depth interviews to related parties in order to get right descriptions about the problems facing by local government and to give the best solutions.*

*Key words: e-government, website, feature, transparency, accountability, effectiveness, efficiency*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas *website* Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip *good governance* yang bersifat transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien serta penilaian fitur yang terdapat dalam *website*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-interpretif. Objek penelitian adalah 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat Teknik analisis data menggunakan teknik analisis skoring. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kualitas *website* sesuai dengan prinsip *good governance* pada Kota di Sumatera Barat masih rendah (2) Rendahnya kualitas *website* mengakibatkan pengguna/user, (pemerintah, perusahaan, investor dan masyarakat) belum mampu memanfaatkan *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Maka disarankan untuk:(1) melakukan evaluasi berkala dalam pengembangan *website* dari pemerintah pusat, (2) menugaskan staf khusus dengan latar belakang pendidikan bidang teknologi informatika untuk memaksimalkan fungsi *website*, (3) memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan *website* pemda, dan (4) untuk penelitian selanjutnya, melakukan wawancara dengan pihak terkait agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi dan dapat memberikan solusi yang tepat.

Kata kunci: e-government, website, fitur, transparansi, akuntabilitas, efektif,efisien

## 1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang website pemerintah daerah (pemda), mau tidak mau kita harus berbicara dulu tentang *e-government*. Istilah *e-government* sebenarnya sudah lama digunakan di banyak negara maju, namun di Indonesia, istilah ini baru menjadi perhatian sejak dikeluarkannya Inpres RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Dalam aturan tersebut, *e-government* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. *E-government* bertujuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat layanan pemerintah lebih dekat pada orang-orang yang menggunakan layanan-layanan tersebut, yaitu masyarakat. Implikasinya, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan publik dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan akan menjadi lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu lama hanya untuk menyelesaikan sebuah perizinan seperti saat ini. Dapat dikatakan bahwa secara garis besar *e-government* mempunyai banyak keuntungan, seperti peningkatan kualitas pelayanan karena pelayanan publik dapat dilakukan selama 24 jam, berkat adanya teknologi internet. Hal ini juga banyak mengurangi penggunaan kertas sehingga proses akan menjadi lebih efisien dan hemat. Selain itu semua proses dilakukan secara transparan karena proses berjalan secara online serta akurasi data lebih tinggi yang dapat mengurangi kesalahan identitas dan lain-lain. Salah satu bentuk penerapan *e-government* adalah melalui website.

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Pasal 53, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Pasal 27, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7A Tahun 2007 Pasal 4 dan Pasal 5. Media elektronik pada ketiga peraturan tersebut merujuk pada *website* milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat (Puspita dan Martani 2012).

Penggunaan *website* merupakan langkah yang tepat dalam penerapan *e-government* sebab informasi yang terkandung didalamnya lebih mudah diakses bagi pengguna informasi. Penggunaan *website* di organisasi publik memegang peran penting dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dengan menyediakan pengungkapan yang lebih efektif dan efisien kepada warga dan organisasi mengenai proses, struktur, dan produk pemerintah, dan dengan menyediakan saluran untuk berinteraksi dengan pemerintah (Bimber 1999; Jun and Weare 2010; La Porte dkk 2001; Musso dkk 2000; Tolbert and Mossberger 2006; West 2004 ).

Menurut rancangan Peraturan Kominfo Tahun 2017, *website* harus mempunyai isi minimal yaitu selayang pandang, pemerintah daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, peraturan atau kebijakan daerah, dan buku tamu dan berita. Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003, *e-government* harus memenuhi aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Apabila semua kriteria terpenuhi, maka barulah website dapat dikatakan

berkualitas.

Kenyataannya penerapan *good governance* dalam pengembangan *website* pada kabupaten/kota di Sumatera Barat belum optimal. Dilihat dari segi ketersediaan informasi maupun pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada pengguna masih ada yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan Kominfo tahun 2007. Seperti tidak updatenya berita, banyak halaman kosong, bahkan ada yang tidak dapat diakses. Padahal anggaran pengembangan *website* yang telah diberikan oleh pemerintah pusat cukup besar, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Anggaran Pengembangan Informasi, Komunikasi, Media Masa, dan e-government Menurut APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

No.	Nama Kota	Anggaran Pengembangan Media Masa
1	Kab. Pasaman	Rp. 1.647.803.400,-
2	Kab. Dhamasraya	Rp. 1.495.404.500,- (hanya untuk e-gov)
3	Kab. Agam	Rp. 1.837.319.600,-
4	Kab. Lima Puluh Kota	Rp. 1.380.426.000,- (hanya untuk media masa)
5	Kab. Tanah Datar	Rp. 1.198.836.000,- (hanya untuk e-gov)
6	Kab. Sijunjung	Rp. 532.387.355,- (hanya untuk e-gov)
7	Kab. Solok Selatan	Rp. 1.260.099.400,- (hanya untuk e-gov)
8	Kab. Kepulauan Mentawai	Rp. 3.444.943.000,-
9	Kab. Pesisir Selatan	Rp. 4.001.355.293,-
10	Kab. Solok	Tidak dipublikasikan
11	Kab. Padang Pariaman*	Rp. 358.300.000,- (hanya untuk media masa)
12	Kab. Pasaman Barat*	Rp. 1.675.776.000,-
13	Kota Padang	Rp. 1.549.980.000,- (hanya untuk e-gov)
14	Kota Solok	Rp. 1.831.286.000,-
15	Kota Sawahlunto	Tidak dipublikasikan
16	Kota Padang Panjang	Rp. 3.832.685.000,-
17	Kota Bukittinggi	Rp. 3.142.016.100,-
18	Kota Pariaman	Rp. 2.520.642.700,-
19	Kota Payakumbuh*	Rp. 3.382.114.000,-

\*website tidak dapat diakses (*under maintenance*)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat (2018)

Fenomena ini mendorong kami untuk melakukan analisis tentang kualitas *website* pemerintah kabupaten/kota tersebut. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Martani dkk (2013), yang melihat bagaimana kualitas *website* tahun 2013 yang diukur dari penilaian transparansi dan akuntabilitas saja dengan sampel 11 kabupaten/kota di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menilai kualitas *website* dari segi fitur *website*, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi *website* dan objeknya yaitu seluruh *website* pemerintah

kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2018. Untuk interpretasi lanjut, kami akan membandingkan dengan website Pemda Kota Surabaya yang merupakan salah satu website Pemda terbaik di Indonesia serta menganalisis sejauh mana kebermanfaatan website bagi pengguna.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kualitas website pemerintah daerah dari segi penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang ada pada seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat? dan (2) Sejauh mana website pemerintah daerah dimanfaatkan oleh para pengguna? Dari permasalahan diatas maka peneliti mengangkat penelitian mengenai **“Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”**.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Agensi

Dalam Teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika salah satu pihak yaitu (*principal*) memberikan/mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan. Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*prinsipal*) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Implikasi teori ini menjelaskan bahwa pemda yang bertindak sebagai agen menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku prinsipal dengan menyediakan seluruh informasi dan layanan publik melalui website.

### 2.2 Teori Signalling

Teori signalling dapat membantu pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*prinsipal*) dalam mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan pihak luar khususnya masyarakat. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik pada website yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan dan non keuangan yang positif dan dapat dipercaya melalui website.

### 2.3 Good Governance

*Good governance* sendiri menurut World Bank adalah *“the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”*. Mengacu pada defenisi diatas, maka kesimpulan sederhana yang didapat adalah bahwa orientasi dari pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance* yang dapat diwujudkan dengan pelayanan publik. Birokrat sebagai pihak yang terlibat dalam pelayanan publik tentu memiliki andil yang cukup besar dalam mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik.

### 2.4 E-government

*E-government* mengacu pada keefektifan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan

meningkatkan pelayanan pemerintah dan operasi disektor masyarakat (Kushchu and Kuscu, 2003). Menurut Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam peraturan ini juga dijabarkan bahwa e-government diperlukan untuk mewujudkan *Good Public Governance*.

Penerapan *e-government* pada dasarnya tidak bisa serta-merta langsung berjalan maksimal terdapat beberapa tahapan *e-government* yang harus dilalui untuk bisa menciptakan *e-government* yang maksimal. Inpres No 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa terdapat empat tahapan pengembangan dari *e-government* yaitu:

1. Tahapan persiapan  
Tahapan ini merupakan tahapan awal dari perkembangan *e-government*. Tahapan ini meliputi beberapa kegiatan seperti pembuatan situs masing-masing institusi, persiapan SDM, persiapan sarana akses, dan melakukan sosialisasi situs.
2. Tahapan Pematangan  
Tahapan pematangan merupakan tahapan yang lebih lanjut dari tahap persiapan. Tahapan ini melakukan modifikasi atas situs instansi yang telah dibuat. Modifikasi yang dilakukan bisa seperti pembuatan situs yang informatif dan *interface* keterhubungan dengan institusi/ lembaga pemerintah yang lain.
3. Tahapan Pemantapan  
Tahapan pemantapan adalah tahapan perkembangan *e-government* yang mulai memasukkan fasilitas pelayanan publik di dalam situs. Fasilitas pelayanan publik tersebut bisa berupa aplikasi atau penyajian data lembaga.
4. Tahapan Pemanfaatan  
Tahapan pemanfaatan adalah tahapan yang terakhir dari perkembangan *e-government* dimana website dimanfaatkan oleh pengguna.

## 2.5 Kualitas Website

Website dikatakan berkualitas jika memenuhi aspek-aspek berikut ini:

### 1. Fitur

Teori yang memberikan penilaian standar kualitas pada bentuk realisasi e-government, yaitu berupa situs website, adalah menurut Kominfo 2007, harus mempunyai isi minimal pada setiap website sebagai berikut:

- a. Selayang Pandang, menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, moto Daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
- b. Pemerintah Daerah, menjelaskan struktur organisasi yang ada di Daerah bersangkutan.
- c. Geografi, menjelaskan antara lain tentang, topografi, demografi, cuaca, dan iklim, sosial, dan ekonomi.
- d. Peta wilayah dan sumber daya, menyajikan batas administrasi wilayah, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh Daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumber daya.
- e. Peraturan atau kebijakan Daerah, menjelaskan Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.

- f. Buku tamu dan berita, tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web Pemerintah Daerah bersangkutan.

## 2. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Governance. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Beberapa kriteria untuk membangun website yang transparan menurut Martandkk(2013):

- a. Laporan Kegiatan Pemerintah  
Berupa laporan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Laporan Kinerja Pemerintah  
Berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD).
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  
Berupa Laporan Posisi Keuangan (LPK)/Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## 3. Akuntabilitas

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Annisningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kriteria Akuntabilitas menurut Krina (2003) dan BPKP :

- a. Laporan APBD Pemda
- b. Laporan Dana Hibah dan Bansos
- c. Penyajian laporan keuangan tepat waktu
- d. Opini Audit dari BPK

## 4. Efektivitas dan Efisiensi

Kualitas dari sebuah pelayanan akan memberikan dampak bagi tercapainya target pemerintah sehingga dapat dikatakan efektif atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kriteria penilaian efektifitas suatu website menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 :

- a. Interactifity  
Proses interaksi dua arah antara Pemerintah pengelola website dan masyarakat pengakses tersebut. Seperti pemerintah menyediakan fasilitas berupa, email, layanan telepon, dan alamat website.
- b. Sistem Navigasi

Merupakan petunjuk bagi pengunjung website berupa, fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat.

Menurut Putra (2013), efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Untuk melakukan penilaian efisiensi terhadap website Pemda memiliki beberapa :

- a. Website tidak memiliki halaman kosong.
- b. Informasi penting terdapat langsung pada halaman utama.
- c. Website tidak memuat halaman perantara.

Dari unsur-unsur di atas apabila Pemerintah dapat melakukan dan mewujudkan ke dalam sistem Pemerintahan e-government melalui situs website, maka terciptanya pelayanan website yang prima akan sangat mungkin terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-interpretif yaitu penelitian dengan tahapan mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan. Objek penelitian ini adalah 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Ada tiga daerah yang *website*-nya tidak bisa diakses yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Payakumbuh, sehingga hanya 16 daerah yang akan dinilai, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Objek Penelitian**

No	Kabupaten/Kota	Alamat website
1	Kab. Pasaman	<a href="http://www.pasamankab.go.id/">http://www.pasamankab.go.id/</a>
2	Kab. Dharmasraya	<a href="http://www.dharmasrayakab.go.id/">http://www.dharmasrayakab.go.id/</a>
3	Kab. Agam	<a href="http://www.agamkab.go.id/">http://www.agamkab.go.id/</a>
4	Kab. Lima Puluh Kota	<a href="http://www.limapuluhkota.go.id/">http://www.limapuluhkota.go.id/</a>
5	Kab. Tanah Datar	<a href="http://www.tanahdatar.go.id/">http://www.tanahdatar.go.id/</a>
6	Kab. Sijunjung	<a href="http://www.sijunjung.go.id/">http://www.sijunjung.go.id/</a>
7	Kab. Solok Selatan	<a href="http://www.solokselkab.go.id/">http://www.solokselkab.go.id/</a>
8	Kab. Kepulauan Mentawai	<a href="http://www.mentawaikab.go.id/">http://www.mentawaikab.go.id/</a>
9	Kab. Pesisir Selatan	<a href="http://www.pesisirselatankab.go.id/">http://www.pesisirselatankab.go.id/</a>
10	Kab. Solok	<a href="http://www.solokkab.go.id/">http://www.solokkab.go.id/</a>
11	Kota Padang	<a href="http://www.padang.go.id/">http://www.padang.go.id/</a>
12	Kota Solok	<a href="http://www.solokkota.go.id/">http://www.solokkota.go.id/</a>
13	Kota Sawahlunto	<a href="http://www.sawahluntokota.go.id/">http://www.sawahluntokota.go.id/</a>
14	Kota Padang Panjang	<a href="http://www.padangpanjangkota.go.id/">http://www.padangpanjangkota.go.id/</a>
15	Kota Bukittinggi	<a href="http://www.bukittinggikota.go.id/">http://www.bukittinggikota.go.id/</a>
16	Kota Pariaman	<a href="http://www.pariamankota.go.id/">http://www.pariamankota.go.id/</a>

#### 3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sekitar enam bulan yaitu pada bulan Januari-Juli 2018.

#### 3.3 Tahapan Penelitian

Pengukuran yang digunakan dalam menilai kualitas website

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat pada penelitian ini menggunakan metode skoring. Analisis skor menunjukkan proses menilai alternatif kebijakan dengan menciptakan dan menggunakan indikator-indikator untuk menilai (memberi skor) alternatif-alternatif kebijakan yang telah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, dan bila diperlukan memberikan pembobotan pada indikator yang dinilai lebih penting dari indikator lain (Dwiyanto, 2009).

Tahap-tahap penelitian ini adalah:

- Melakukan skoring dari masing masing unit analisis pada website.
- Melakukan analisis skoring dari segi konten penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
- Melakukan intepretasi dari segi user (pemerintah, perusahaan, investor dan masyarakat) dan perbandingan dengan *website* pemerintah daerah terbaik di Indonesia yaitu Kota Surabaya.

Standarisasi unit analisis dalam menilai kualitas website pada website resmi kota yang ada di Sumatera Barat dari berbagai referensi yang akan diskoring oleh peneliti dalam kertas kerja. Dalam melakukan perhitungan penilaian perbandingan, maka akan diberikan skor tertentu dengan mengacu kepada analisis skala penilaian (Sulistiyo dkk, 2008). Jika data ada/tersedia, maka diberi skor 1, jika data tidak ada/ tidak tersedia, maka diberi skor 0. Rumus perhitungan bobot skor yaitu sebagai berikut :

$$\text{Bobot skor} = \frac{\text{Jumlah hasil skoring website pemda}}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh bobot skor, lalu dilakukan penilaian sesuai dengan tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Tingkat Penilaian**

Skor (%)	Penilaian
0-25	Tidak berkualitas
26-50	Kurang berkualitas
51-75	Cukup berkualitas
76-100	Berkualitas

(Sumber: Sulistiyo dkk, 2008)

### 3.4 Kategori Penilaian

Tabel berikut ini memperlihatkan unit analisis dan kategori penilaian dari setiap kriteria penilaian kualitas website:

**Tabel 4**  
**Unit Analisis dan Kategori Penilaian**

No	Kriteria Penilaian	Unit Analisis/Kategori	Sumber Rujukan
1	Penilaian Fitur	Selayang Pandang: - Sejarah - Moto daerah - Lambang daerah - Lokasi dalam bentuk peta - Visi dan misi	Kominfo, 2007
		Pemerintah daerah: - Legislatif - Eksekutif	
		Geografi: - Topografi - Demografi - Cuaca - Iklim	
		Peta wilayah/sumber daya: - Batas administrasi wilayah - Sumber daya/potensi daerah	
		Peraturan/kebijakan daerah: - Peraturan daerah - Peraturan walikota	
		Buku tamu dan berita - Berita - Layanan masukan/ pengaduan masyarakat	
2	Penilaian Transparasi	Kegiatan pemerintah: - Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJM) - Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Martani dkk, 2013
		Laporan Kinerja Pemerintah Daerah: - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) - Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	
		Laporan Keuangan Daerah: - Neraca - Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Arus Kas - Catatan Atas Laporan Keuangan	
3	Penilaian Akuntabilitas	Menyajikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Martani dkk, 2013
		Menyajikan Laporan Dana Hibah dan Bansos	Krina, 2003
		Penyajian Laporan Keuangan tepat waktu	Krina, 2003
		Adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Krina, 2003

4	Penilaian Efektivitas	Interactivity: - Layanan publik - Email - Telepon - Alamat website	Kominfo, 2007
		Sistem navigasi: - Fitur pencarian - Akun Resmi Media Sosial Pemerintah Daerah - Statistik Pengunjung	
5	Penilaian Efisiensi	<i>Website</i> tidak memiliki <i>link</i> kosong ( <i>broken link</i> )	Putra, 2013
		Informasi penting terdapat langsung pada halaman utama	
		<i>Website</i> tidak memuat halaman perantara	

Berikut adalah penjelasan dari kelima kriteria penilaian untuk mengukur kualitas *website* pemerintah daerah. Penilaian fitur merupakan penilaian atas penampilan *website* di halaman depan, diharapkan tampilan *website* menarik dan memuat gambaran umum tentang pemerintah daerah. Penilaian transparansi merupakan penilaian atas keterbukaan dan kejelasan informasi yang disediakan pemerintah misalnya informasi mengenai kegiatan pemerintah dan laporan kinerja pemerintah. Penilaian akuntabilitas merupakan penilaian atas pertanggungjawaban anggaran dan dana lainnya. Penilaian efektifitas merupakan penilaian ketepatan pemanfaatan *website* misalnya interaksi pengguna *website* dengan pemerintah. Penilaian efisiensi merupakan penilaian atas efisiensi pemanfaatan halaman *website*.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Semua tahapan penelitian dilakukan untuk 16 *website* pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian. Tahapan skoring disajikan pada kertas kerja terlampir. Tahapan analisis skoring disajikan pada Tabel 5 dibawah ini. Tahapan analisis disajikan di bagian Pembahasan. Tabel berikut ini memperlihatkan hasil skoring dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 5**  
**Hasil Persentase Bobot Skor**

No	<i>Website</i> Pemd	Fitur	Transpa ransi	Akunta bilitas	Efeksi vitas	Efisi ensi	Bobot Skor	Kualitas
1.	Kab. Pasaman	25%	2,5%	2,5%	7,5%	5%	42,5%	Kurang berkualitas
2.	Kab. Dhamasraya	42,5%	10%	5%	12,5%	2,5%	72,5%	Cukup berkualitas
3.	Kab. Agam	25%	0	0	10%	5%	40%	Kurang berkualitas
4.	Kab. Lima Puluh Kota	37,5%	10%	7,5%	15%	5%	75%	Cukup berkualitas

5.	Kab. Tanah Datar	30%	7,5%	7,5%	12,5%	2,5%	60%	Cukup berkualitas
6.	Kab. Sijunjung	32,5%	0	5%	5%	5%	47,5%	Kurang berkualitas
7.	Kab. Solok Selatan	37,5%	5%	5%	15%	5%	67,5%	Cukup berkualitas
8.	Kab. Kepulauan Mentawai	15%	0	0	0	2,5%	17,5%	Tidak berkualitas
9.	Kab. Pesisir Selatan	40%	0	5%	15%	2,5%	62,5%	Cukup berkualitas
10.	Kab. Solok	30%	5%	2,5%	12,5%	5%	55%	Cukup berkualitas
11.	Kota Padang	30%	2,5%	7,5%	15%	2,5%	60%	Cukup berkualitas
12.	Kota Solok	35%	2,5%	5%	15%	5%	65%	Cukup berkualitas
13.	Kota Sawahlunto	27,5%	0	0	12,5%	2,5%	45%	Kurang berkualitas
14.	Kota Padang Panjang	27,5%	12,5%	7,5%	7,5%	2,5%	57,5%	Cukup berkualitas
15.	Kota Bukittinggi	35%	7,5%	5%	10%	7,5%	65%	Cukup berkualitas
16.	Kota Pariaman	22,5%	7,5%	5%	12,5%	5%	52,5%	Cukup berkualitas
	Rata-rata	30,5% (53%)	4,5% (8%)	5,8% (10%)	11,1% (20%)	5,4% (9%)	57,5% (100%)	
		Cukup lengkap	Tidak transparan	Tidak akuntabel	Tidak efektif	Tidak efisien		

Sumber: kertas kerja yang disajikan di Lampiran

Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki *website* resmi Pemerintah Daerah. Namun dari segi kebermanfaatan maupun fungsi, beberapa *website* belum dapat ditelaah apakah *website* tersebut mempunyai data informasi yang terupdate, karena masih ada yang tidak menyajikan data sesuai kriteria penilaian. Secara rata-rata belum ada kabupaten/kota yang memiliki *website* berkualitas. Jika dilihat dari masing-masing aspek penilaian, tidak ada aspek penilaian yang nilainya baik (>75%).

Dari Tabel 5 di atas dan kertas kerja terlampir terlihat bahwa *website* pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan skor tertinggi dengan nilai persentase 75% (Cukup berkualitas) dengan menyajikan 30 informasi dari total 40 item penilaian. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki persentase bobot skor terendah dengan nilai 17,5% (Tidak berkualitas), hanya mampu menyajikan tujuh informasi dari total 40 item penilaian, dengan nilai 0 untuk penilaian transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.

Untuk penilaian transparansi, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto tidak menyajikan satu pun item penilaian pada *website* pemerintah

daerahnya. Untuk penilaian akuntabilitas, Kabupaten Agam, Kabupaten Mentawai dan Kota Sawahlunto tidak menyajikan satu pun item penilaian. Berarti untuk penilaian transparansi dan akuntabilitas, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto bernilai 0. Untuk penilaian efektifitas dan efisiensi, tidak ada satupun *website* yang menyajikan keseluruhan item penilaian. Rata-rata *website* tidak efektif dalam sistem navigasinya dan sebagian besar *website* memiliki *link* kosong.

#### 4.2 Pembahasan

Rendahnya kualitas *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak sebanding dengan dana yang dibelanjakan untuk pengadaan informasi, komunikasi, *website* dan atau media masa dalam rangka implementasi *good governance*. Dari 16 *website* yang dinilai, 11 diantaranya atau sekitar 69% berada di level 'cukup berkualitas', 4 *website* (25%) berada di level 'kurang berkualitas, dan sisanya (6%) berada di level 'tidak berkualitas'. Tidak ada *website* yang berada di level 'berkualitas'. Sementara dana yang dikeluarkan lebih dari Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 4 milyar.

Dilihat dari kertas kerja pada Lampiran, informasi yang paling banyak disajikan oleh Pemda dalam *website* adalah penyajian penilaian fitur. Hampir seluruh *website* menyediakan semua unit kategori dari masing-masing unit analisisnya. Kabupaten Dhamasraya memperoleh skor paling tinggi dengan menyediakan seluruh unit analisisnya. Sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh skor paling rendah dengan hanya menyediakan 15% informasi. Dari penilaian transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, tidak ada *website* pemerintah daerah yang menyajikan 100% informasi sesuai kriteria penilaian.

Selama ini pemerintah pusat memberikan anggaran yang besar untuk implementasi *good governance*, namun sepertinya tidak pernah melakukan evaluasi atas penggunaan dana tersebut. Tidak ada kasus pidana terkait anggaran *website*/media massa yang ditemukan BPK dalam audit atas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa penggunaan dana tidak disalahgunakan. Namun pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan *e-government* ini agar dana yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia. Pengawasan dari pemerintah pusat diperlukan agar efektifitas penggunaan dana dapat terwujud. Untuk itu, pemerintah daerah harus memiliki staf khusus untuk mengelola *website*. Staf bertanggung jawab atas isi *website*, membaca dan membalas email, *me-follow up* pengaduan masyarakat, dan lain sebagainya.

Kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan *e-government* sesuai Inpres No 3 Tahun 2003 dalam penyajian informasi masih berada dalam fase pertama dan fase kedua. Fase pertama merupakan fase penampilan *website* (*web presence*) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat dimana sudah tersedia pada semua *website* pemerintah daerah. Kemudian fase kedua merupakan fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan alamat surat elektronik (*e-mail*). Namun pada fase kedua ini tidak semua berjalan karena walaupun sebagian besar *website* pemerintah terdapat menu khusus/*link* untuk *download* informasi atau dokumen keuangan dan kinerja tetapi menu khusus dan *link* tersebut hanya berupa halaman kosong. Sedangkan untuk komunikasi melalui *e-mail*, *website* pemerintah masih bersifat pasif. Penulis telah mencoba mengirim *e-*

*mail* kepada beberapa pemerintah daerah, namun tidak ada respon. Beberapa *website* juga menyediakan forum interaksi dengan masyarakat namun tidak aktif.

Pengelolaan *website* pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat, jika dibandingkan, belum semaksimal pengelolaan *website* pemerintah Kota Surabaya. *Website* pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai *website* pemerintah daerah terbaik di Indonesia pada tahun 2016, yang dinilai dari segi konten, navigasi, aksesibilitas, estetika, dan aktualitas. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik kepada walikota Surabaya (<http://beritasatu.com>). *Website* pemerintah Kota Surabaya dengan alamat [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id) memperlihatkan halaman depan dengan tampilan yang menarik. *Website* menyediakan segala informasi seperti informasi layanan publik, pariwisata, ekonomi bisnis, visi misi, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), data kependudukan, data statistik terkait, dan masih banyak lagi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah menerapkan sistem *Surabaya Single Window* (SSW), yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui *mobile-phone*.

Analisis berikutnya dilihat dari kebermanfaatan *website* dari sisi pengguna yaitu pemerintah, perusahaan, investor, dan masyarakat umum:

*Website* pemerintah daerah seharusnya dapat menjembatani komunikasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah untuk saling berinteraksi, baik dalam segi pelaporan maupun penyediaan informasi publik. Sebagian besar *website* pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yaitu suatu pelayanan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik, untuk proses pengadaan barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan, yang dapat dilakukan secara efisien. Hanya *website* pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman yang belum menerapkan layanan tersebut.

Pemerintah pusat memanfaatkan *website* untuk memperoleh informasi tentang pemerintah daerah. Informasi yang dibutuhkan pemerintah pusat antara lain informasi laporan keuangan, laporan kinerja, informasi tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, dan Tenaga Kerja. Informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah ini telah tersaji pada beberapa *website* pemerintah daerah walaupun masih ada pemerintah daerah yang tidak melakukan *up-date* atas informasi tersebut, seperti pemerintah Kota Solok yang menyajikan informasi hanya sampai dengan tahun 2015.

Kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain akan seluruh informasi *ter-update* pada *website* pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat belum tercapai. Mungkin saja seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat sudah langsung diberikan, namun belum seluruhnya dipublikasikan. Seharusnya pemerintah daerah dapat secara langsung mempublikasikan seluruh informasi keuangan maupun non keuangan, agar *website* terlihat lebih transparan dan akuntabel.

Perusahaan sebagai salah satu pengguna *website* pemerintah daerah, tentunya berharap *website* dapat mempermudah, misalnya, dalam mendaftarkan dan membuat perizinan perusahaannya, kemudian menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah, atau tersedianya peraturan pemerintahan

yang berkaitan dengan usaha/bisnis. Beberapa website pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat telah menjalankan program Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMSP) dengan tersedianya *link* pada *website* masing-masing. Dalam program tersebut berbagai formulir surat perizinan yang sudah bisa langsung didapatkan dengan cara *download*-nya saja. *Website* pemerintah daerah yang telah menjalankan program tersebut adalah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Sementara untuk website pemerintah Kota Padang masih berupa halaman kosong, sedangkan pemerintah Kota Bukittinggi belum menerapkan program tersebut dalam websitenya. Beberapa *website* yang lain sudah menyajikan fitur PMSP namun masih berupa peraturan dan formulir perizinan tidak bisa *download*. Belum ada satupun *website* pemerintah daerah yang menyediakan fasilitas untuk menghitung besarnya pajak daerah yang harus dibayar perusahaan. Hal ini membuat perusahaan menghabiskan waktu dan tenaga untuk datang ke kantor dinas yang bersangkutan. *Website* menjadi tidak efektif dan efisien karena belum mampu mempermudah pelayanan.

Dilihat dari sisi investor, dari 16 website pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang diteliti, hanya website pemerintah Kota Padang Panjang yang cukup mampu memenuhi kebutuhan informasi untuk investor. Investor dapat mengetahui keadaan Kota Padang Panjang dari sektor pariwisata dengan mengakses *website* pemerintah daerahnya. Meskipun begitu, *website* pemerintah Kota Padang Panjang masih belum menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan informasi penting bagi investor.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh memiliki tingkat ekonomi yang sangat tinggi dari berbagai sektor seperti perikanan, peternakan, pertanian, perdagangan dan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan penyumbang tertinggi dalam peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Sepanjang tahun 2018, tercatat 27 tempat pariwisata ramai pengunjung di Kota Payakumbuh. Namun sayangnya, pemerintah Kota Payakumbuh belum memanfaatkan informasi tersebut untuk mempublikasikannya melalui *website*. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum mengoptimalkan *website* pemerintah daerahnya, padahal sektor pariwisata merupakan penyumbang terbesar PAD. Pemerintah Mentawai mencatat ada sekitar 10.500 warga negara asing yang mengunjungi Mentawai pada 2017, lebih dari 50 persen berasal dari Australia, Amerika Serikat, Brazil, Jepang dan Spanyol. Selain itu untuk menambah pendapatan daerah, setiap wisatawan luar negeri yang ingin berselancar di Mentawai dikenakan biaya Rp 1 juta per orang. Di Mentawai terdapat sekitar 23 *resort*, sepuluh diantaranya merupakan *resort* dengan skala besar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara (tidak termasuk yang domestik) yang mengunjungi Sumatera Barat meningkat dalam tiga tahun terakhir, dengan tingkat hunian hotel lebih dari 50% tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun *website* Pemda belum dikelola dengan maksimal, ternyata tidak mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Bisa dibayangkan peningkatan di sektor pariwisata ini jika *website* seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat berfungsi secara maksimal.

Pemanfaatan website kepada masyarakat adalah agar dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui informasi *website* yang beragam sehingga

masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contohnya tersedianya formulir pembuatan e-KTP agar masyarakat tidak perlu mendatangi Kantor Camat terlebih dahulu hanya untuk mengambil formulir pendaftaran. Namun belum satupun pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menyajikannya. Masyarakat awam masih belum merasakan manfaat dari keberadaan *website* pemerintah kabupaten/kota di daerahnya masing-masing.

Ulum dan Sofyani (2016:35) menyatakan bahwa penyelenggaraan *good governance* dapat terjadi jika tiga prinsip dasar yang meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas telah terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *website* pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat belum mampu memenuhi tiga prinsip dasar tersebut. Rendahnya kualitas *website* yang menyebabkan rendahnya kebermanfaatan *website* bagi masyarakat merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak bisa menutup mata bahwa PAD mereka bertumpu pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata hanya dapat berkembang jika daerah memiliki banyak investor dan dikunjungi oleh banyak wisatawan. *Website*, sebagai bagian dari *e-government*, harusnya mampu menampilkan 'wajah' daerah agar investor tertarik menanamkan modalnya dan wisatawan tertarik untuk berkunjung. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa walaupun *website* belum bermanfaat secara maksimal, jumlah wisatawan tetap meningkat setiap tahun. Bisa dibayangkan bagaimana pesatnya perkembangan sektor pariwisata jika *website* dikelola dengan baik.

Di era digital saat ini, *website* merupakan media yang terbaik untuk mengimplementasikan *good governance*. Jika *website* pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat bisa dikelola dengan baik, maka asimetri informasi akan berkurang, masyarakat akan terlayani dengan baik, *good governance* akan terwujud, yang pada akhirnya akan memungkinkan daerah menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung lagi dengan pusat.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kualitas *website* pemerintah daerah dari 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat, sebelas diantaranya mendapatkan kategori penilaian cukup berkualitas, empat *website* mendapatkan kategori penilaian kurang berkualitas, dan satu *website* mendapatkan kategori penilaian tidak berkualitas. Rata-rata *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat belum mampu menerapkan *good governance* dalam *website* pemerintah daerahnya, yaitu bersifat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan dari penerapan *e-government* dengan dibuatnya *website* sebagai sebuah pelayanan publik kepada pengguna belum semuanya terwujud dikarenakan masih banyak kriteria yang diberi skor 0.
2. Dari segi pengguna, mungkin hanya pemerintah pusat yang cukup terbantu dengan adanya *website* pemerintah daerah, namun bagi perusahaan, investor, maupun masyarakat belum ada yang benar-benar memanfaatkan *website* pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### 6.1 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat harus berbenah diri dalam implementasi *e-government*, khususnya *website*. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas *website* adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat harus melakukan evaluasi berkala dalam pengembangan *website* pemerintah daerah dan memberikan sanksi jika *website* pemerintah daerah tidak berkualitas.
2. Pemerintah daerah seharusnya memiliki minimal satu orang staf khusus dengan latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi sehingga *website* dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan *Good Governance*.
3. Pemerintah daerah seharusnya memberikan sosialisasi kepada pengguna/masyarakat tentang keuntungan dari penggunaan *website* pemerintah daerah agar *website* pemerintah daerah menjadi salah satu sarana bagi masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik.

### 6.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak dilakukannya wawancara dengan pihak terkait. Data yang dikumpulkan hanya berupa [data sekunder](#) (data dari *website*). Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan wawancara dengan pihak terkait agar didapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Dwi, Harpanto Guna Sabanu, dan Fahrizal Noor. 2015. *Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. Diakses melalui [jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/download/10/7](http://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/download/10/7) tanggal 5 Januari 2018.
- Aprilia, Nurina Shanty, Andy Fefta Wijaya, Suryadi. 2014. *Efektivitas website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah*. Wacana, Volume 17 Nomor 2.
- Arum Sari, Kusuma Dewi dan Wahyu Agus Winamo. 2015. *Implementasi E-government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Volume 11 Nomor 1.
- Auditya, Lucy, Husaini, dan Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness: Volume 3 Nomor 1.
- Cahyadi Arif. 2016. *Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 2.
- Cordella, Antonio, dan Niccolo Tempini. 2015. *E-government and Organizational Change: reporting the role of ICT and Bureaucracy in Public Service Delivery*. UK: Government Information Quartely.
- Damanik, Marudur Pandapotan dan Erisva Hakiki Purwaningsih. 2017. *E-government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Transparansi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2012. *Metode Penelitian*

- Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hardono, Wisnu. 2015. *Analisis Kualitas dan Efektifitas E-Government sebagai Media Pelayanan Publik di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Haryanto. 2008. *Agency Theory*. Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id> tanggal 5 Januari 2018.
- Heryana, Toni. 2013. *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 Nomor 1.
- Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Irawan, Bambang. 2013. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Diakses melalui <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/viewFile/351/312> tanggal 5 Januari 2018.
- Jarot, Dimas Bayu. *Ini Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal*. Diakses melalui <http://nasional.kompas.com> tanggal 25 Januari 2018.
- Jauhari, Arif, Hasan Basri, dan Shabri. 2015. *Penerapan Good Governance Berbasis E-Goverment dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh*. Jurnal Administrasi Akuntansi, Volume 4 Nomor 3.
- Khudri, Yusuf, Dwi Martani, dan Teguh I. Maulana. 2013. *Analisis Kualitas Desain dan Kunjungan Situs Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, dan Teknik Sipil), Volume 5.
- Kurniawan, Agung. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*. Diakses melalui <http://dokupdf.com> tanggal 4 Januari 2018.
- Martani, Dwi, Debby Fitriyani, dan Annisa. 2013. *Transparansi Keuangan Dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, dan Teknik Sipil), Volume 5.
- Martha. 2014. *Transparansi dan Akuntabilitas*. Diakses melalui <https://repository.widyatama.ac.id> tanggal 5 Januari 2018.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maisyah, Putra. 2017. *PANRB Mentargetkan Tahun 2017 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bisa Diwujudkan*. Diakses melalui <http://news.liputan6.com>. Tanggal 25 Januari 2018.
- Ningrum, Annisa. 2010. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan*. Diakses melalui <http://ovy19.wordpress.com>. Tanggal 5 Januari 2018.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Rancangan) Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41/PER/M.KOMINFO/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Versi 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2000 tentang Good Governance.
- Panopoulou, Eleni, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabani. 2008. *A Framework For Evaluating Web Sites Of Public Authorities*. Yunani.

- Putra, Sata Aswel. 2013. *Konsep dan Jenis Website serta Kriteria Website yang Baik*. Diakses melalui <http://sataaswelputra.blogspot.com> tanggal 3 Maret 2018.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Tesis Tidak Publikasi. Semarang.
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. *Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern*. STIA LAN Bandung.
- Rasul, Sjahrudin. 2011. *Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/40550-ID-penerapan-good-governance-di-indonesia-dalam-upaya-pencegahan-tindak-pidana-koru.pdf> tanggal 5 Januari 2018.
- Sitokdana, Melkior N. N., 2015. *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura*. Diakses melalui <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jbi/article/view/461> tanggal 5 Januari 2018.
- Sulistiyo, Dana, Herlan Puspa Negara, dan Yanuar Firdaus. 2008. *Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), Volume 1 Nomor 5.
- Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Wau, Ikhlas. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Widjajanto Budi, Yuliman Purwanto, dan Nova Rijati. 2015. *Analisis Layanan Informasi Publik pada Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 6-8 Februari 2015.
- Wirartha. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta.
- Wiratmo, Liliek Budiastuti, Noor Irfan, dan Kuwatono. 2017. *Website Pemerintah Sebagai Sarana Online Public Relations*. Diakses melalui [jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/download/139/115](http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/download/139/115) tanggal 5 Januari 2018.
- Yogiswara, Putu Krishna, Piers Andreas Noak, dan Ketut Winaya. 2015. *Peranan E-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik*. Universitas Udayana.
- Yohana, Nova, Tantri Puspita Yazid, dan Welly Wirman. 2013. *Pengelolaan Website sebagai E-Government oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penyampaian Informasi bagi Masyarakat*. Universitas Riau.
- Yoserizal dan Wahyu Eko Yudiantmaja. 2010. *Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Universitas Andalas Padang.
- Yuhefizar. 2010. *Tinjauan Penerapan e-Government di Provinsi Sumatera Barat*. Poli Rekayasa, Volume 5 Nomor 2.